



RENJA

2023

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN
STATISTIK

Provinsi Sumatera Barat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya RPJMD Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 tahun serta Rencana Kerja (Renja) Tahunan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun.

Didorong oleh kebutuhan digitalisasi yang menjadi semakin krusial, koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat, para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi melakukan transformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital serta peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat merupakan penyelenggara Pemerintahan Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di daerah yang menjalankan 3 (tiga) Urusan Wajib non pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab serta landasan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, dimana dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan berupaya mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Landasan kinerja dituangkan dalam bentuk Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dilaksanakan dengan fokus dan berpedoman terhadap:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050 – 3708 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Visi, misi, dan Program Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Renja Tahun 2023 dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan awal Renja SKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Renja Tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2), 18 A dan Pasal 28 (F);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 7. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 12. Perka Lemsaneg Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Urusan Persandian;
 13. Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 017/BSSN/D2/PP.05.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2018 perihal Penyampaian Nomenklatur Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Kunci urusan Persandian;
 14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 046/216/Bangda tanggal 17 Januari 2019 perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Noor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan maksud agar terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Renja dijadikan pedoman saat menjabarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan pendekatan *money follows program* dan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai Renstra 2021 – 2026;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024;
- 2.5 Penelaahan Terhadap Program Usulan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berisi penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan pencapaian Rencana Strategis dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan Renstra serta kendala dan hambatan yang dihadapi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 32.334.789.827,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.785.050.475,- persentase realisasi 95,2%. Alokasi anggaran tersebut yang digunakan untuk melaksanakan 5 program (4 program urusan dan 1 program non urusan), 13 kegiatan dan 51 subkegiatan.

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	persentase	100	5.462.970.814,-	100	5.196.238.199,-	100	95.12
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persentase	100	91.229.150,-	100	88.743.650,-	100	97.28
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Forum OPD; 2. Jumlah Renja yang disusun;	kali dokumen	2 2	35.014.250 ,-	1 2	34.546.250 ,-	75,00	98,66
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun;	dokumen	1	10.647.800 ,-	1	10.602.500 ,-	100	99.57
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun; 2. Terlaksananya rapat.	dokumen kali	1 6	13.350.200 ,-	1 6	12.721.250 ,-	100	95.29
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun;	dokumen	1	12.500.050 ,-	1	11.863.150 ,-	100	94.90
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Tersusunnya laporan kinerja (LAKIP); 2. Tersusunnya LKPJ; 3. Tersusunnya LPPD;	dokumen dokumen dokumen	1 1 1	6.120.150 ,-	1 1 1	5.450.750 ,-	100	89.06
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan; 2. Terlaksananya rapat.	dokumen kali	4 3	13.596.700 ,-	4 3	13.559.750 ,-	100	99.73
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	persentase	100	3.735.521.199,-	100	3.642.832.696,-	100	97.52
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang	57	3.466.723.349,-	57	3.403.190.246 ,-	100	98.17
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	12	218.860.000,-	12	192.180.100,-	100	87.81

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	43	8.296.600,-	43	7.552.000,-	100	91.03
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1	14.591.200,-	1	14.103.200,-	100	96.66
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	1	9.349.750,-	1	8.579.650,-	100	91.76
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	dokumen	18	17.700.300,-	18	17.227.500,-	100	97.33
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	persentase	100	42.882.500,-	100	27.449.433,-	100	64.01
2.16.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan.	unit	6	19.000.000,-	6	5.112.347,-	100	26.91
2.16.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	2	12.287.800,-	2	11.796.530,-	100	96.00
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	2	11.594.700,-	2	10.540.556,-	100	90.91
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	persentase	100	42.000.000,-	100	42.000.000,-	100	100.00
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	100	42.000.000,-	100	42.000.000,-	100	100.00
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	persentase	100	348.230.035,-	100	345.703.266,-	100	99.27
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	bulan	12	16.288.000,-	12	16.274.000,-	100	99.91
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Alat tulis kantor yang disediakan; 2. Tersedianya kebutuhan kantor.	bulan bulan	12 12	72.796.900,-	12 12	72.732.400,-	100	99.91
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	bulan	12	13.621.250,-	12	13.621.250,-	100	100
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	180	245.523.885,-	180	243.075.616,-	100	99.00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100	632.972.150,-	100	520.892.804,-	100	82.29
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen/surat yang difasilitasi	bulan	12	3.029.400,-	12	3.019.000,-	100	99,66
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah tagihan air (PDAM); 2. Jumlah tagihan listrik (PLN); 3. Jumlah tagihan telepon.	m ³ m ³ rekening telp/bulan	3.000 200.000 2	223.071.500,-	3.000 200.000 2	157.163.455,-	100	70.45
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Tenaga kebersihan; 2. Tenaga sopir; 3. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa tenaga pengamanan.	orang orang orang	5 4 5	406.871.250,-	5 4 5	360.710.349,-	100	88.65
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	persentase	100	250.052.000,-	100	241.202.950,-	100	96.46
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terpeliharanya kendaraan dinas, perizinan dan pajak kendaraan roda 2; 2. Terpeliharanya kendaraan dinas, perizinan dan pajak kendaraan roda 4.	unit unit	7 7	44.200.000,-	7 7	41.273.450,-	100	93.38
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Genset; 2. Terpeliharanya AC.	unit unit	1 24	14.640.000,-	1 24	14.640.000,-	100	100.00
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Perbaikan instalasi air; 2. Perbaikan instalasi listrik;	paket paket	1 1	191.212.000,-	1 1	185.289.500,-	100	90.90
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	persentase	10	10.454.122.284,-	13.90	9.628.419.545,-	139	72.88
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan program strategis pemerintah	persentase	10	10.454.122.284,-	13.90	9.628.419.54,-	139	92.10

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1. Tersedianya rekomendasi berdasarkan hasil pantauan aduan masyarakat;	dokumen	4	35.709.300,-	4	35.337.871,-	100	98.96
		2. Tersedianya rekomendasi berdasarkan hasil pantauan isu publik di media massa dan media sosial;	dokumen	4		4			
		3. Tersedianya rekomendasi berdasarkan hasil polling pendapat umum publik.	dokumen	4		4			
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1. Jumlah rilis kegiatan pemerintahan;	rilis	750	162.446.750,-	750	160.116.350,-	100	98.57
		2. Jumlah video kegiatan pemerintahan;	video	90		900			
		3. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah sesuai dengan strategi komunikasi (strakom);	persentase	10		10			
		4. Tersedianya honor tenaga IT support.	orang	4		4			
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1. Diseminasi informasi melalui tatap muka;	kali	14	6.829.564.280,-	14	6.232.250.853,-	100	91.25
		2. Publikasi informasi melalui koran lokal;	bulan	12		12			
		3. Publikasi informasi melalui koran nasional;	halaman	30		30			
		4. Publikasi informasi melalui media luar ruang;	halaman	1		1			
		5. Publikasi informasi melalui media online;	kali	15		15			
		6. Publikasi melalui media radio;	kali	6		6			
		7. Publikasi melalui media televisi;	kali	6		6			
		8. Tersedianya kamera;	unit	8		8			
		9. Tersedianya laptop;	unit	1		1			
		10. Tersedianya tripod kamera.	unit	1		1			
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	1. Penyelenggaraan rakor PPID;	kali	2	443.680.739,-	2	441.493.118,-	100	99.51
		2. Tersedianya dokumen informasi publik;	dokumen	1		1			
		3. Workshop penyusunan DIP.	kali	2		2			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	1. Media briefing; 2. Media gathering; 3. Pertemuan dengan pemimpin redaksi; 4. Publikasi melalui media tv lokal; 5. Publikasi melalui media tv nasional.	kali kali kali kali kali	4 1 4 12 4	68.005.523,-	4 1 4 12 4	65.594.450,-	100	96.45
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1. Bimtek pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); 2. Bimtek pemilihan media tradisional terbaik; 3. Persentase komunitas masyarakat mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi; 4. Rakor pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat se-Sumatera Barat; 5. Rakor pembinaan media tradisional se-Sumatera Barat; 6. Sarasehan; 7. Workshop kelompok informasi masyarakat; 8. Workshop media tradisional.	kali kali kali kali kali kali kali kali	1 1 1 1 1 1 1 1	339.795.550,-	1 1 1 1 1 1 1 1	300.192.600,-	100	88.35
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1. Dukungan administrasi KI; 2. Jumlah sengketa informasi yang diselesaikan; 3. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022; 4. Publikasi media online rutin;	bulan %perkara kali kali	12 75 1 1	2.540.603.242,-	12 75 1 1	2.363.790.903,-	100	93.04
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya rakor bako humas	kali	4	34.316.900,-	4	29.643.400,-	100	86.38

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (skala 1-5)	indeks	3.2	15.385.390.807,-	3.2	15.008.009.036,-	100	97.56
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang pengelolaan nama domain sesuai dengan standar Permen Kominfo	OPD	48	9.872.579.750,-	48	9.640.118.335,-	100	97.65
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain instansi penyelenggara negara; 2. Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar.	domain OPD	1 48	15.878.750,-	1 48	15.589.250,-	100	98.18
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo; 2. Terpenuhinya kebutuhan internet VSAT; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan jaringan TIK.	OPD bulan tahun	48 12 1	9.856.701.000,-	48 12 1	9.624.529.085,-	100	97.64
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks SPBE (1-5)	indeks	3.2	5.512.811.057,-	3.2	5.367.890.701,-	100	97.37
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;	OPD	51	276.396.395,-	51	274.971.792,-	100	99.48

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 3. Terlaksananya rapat koordinasi SPBE dengan OPD dan Kab/Kota;	aplikasi kali	50 3		50 3			
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah; 2. Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah; 3. Terpenuhinya kebutuhan lisensi hardware dan software; 4. Terpenuhinya perangkat jaringan TIK.	OPD OPD bulan bulan paket	51 3 12 2	2.429.908.702,-	51 3 12 2	2.371.639.167,-	100	97.60
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1. Tersedianya kebutuhan komputer jaringan; 2. Terpenuhinya kebutuhan lisensi vidcon; 3. Terpenuhinya operasional mobilitas TIK; 4. Terpenuhinya peralatan komunikasi; 5. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan oleh Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (command center).	paket bulan tahun paket paket	2 12 1 2 3	283.300.500,-	2 12 1 2 3	259.404.400,-	100	91.57
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1. Jumlah kegiatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan ekosistem dalam rangka pemanfaatan infrastruktur pita lebar; 2. Terpenuhinya kebutuhan Tenaga TIK (IT Network);	Kab/Kota tahun	19 1	1.310.245.760,-	19 1	1.253.339.374,-	100	95.66

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Terpenuhinya koordinasi dan monitoring infrastruktur TIK OPD;	kali	3		3			
		4. Terpenuhinya koordinasi infrastruktur TIK dengan pusat atau luar daerah.	kali	6		6			
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Jumlah data yang dapat berbagi pakai;	data	4	1.203.508.000,-	4	1.199.094.468,-	100	99.63
		2. Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah;	aplikasi	28		28			
		3. Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik;	aplikasi	110		110			
		4. Terbayarnya gaji tenaga ahli teknologi informasi Provinsi Sumatera Barat.	orang	17		17			
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1. Jumlah kab/kota yang terhubung;	kab/kota	19	9.451.700,-	19	9.441.500,-	100	99.89
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				431.283.610,-				
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persentase	60	431.283.610,-		422.752.620,-	100	98.02
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1. OPD yang menggunakan data statistik sektoral untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah;	persentase	60	431.283.610,-	60	422.752.620,-	100	98.02
		2. Meningkatnya OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	persentase	60		60			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1. Tersedianya buku DDA/SBDA; 2. Tersedianya buku PDRB; 3. Tersedianya buku profil daerah; 4. Tersedianya buku statistik Diskominfotik; 5. Tersedianya buku statistik sektoral	buku buku buku buku buku	1 1 1 1 1	126.020.000,-	1 1 1 1 1	124.574.955,-	100	98.85
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah petugas statistik sektoral lingkup pemda yang ikut bimtek/ yang dilatih	orang	100	81.152.300,-	100	79.154.526,-	100	97.54
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Meningkatnya persentase kelengkapan metadata kegiatan dan indikator statistik sektoral	persentase	20	78.862.000,-	20	77.802.703,-	100	98.66
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan sosialisasi/rakor/ workshop yang dilaksanakan	kali	5	145.249.310,-	5	141.220.436,-	100	97.23
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				601.022.312,-				
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	persentase	45	601.022.312,-	45	529.631.075,-	100	88.12
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	persentase	100	518.202.242,-	100	469.880.925,-	100	90.68
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan; 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan persandian ke pusat; 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian ke kab/kota;	persentase kali kab/kota	100 2 10	169.353.350,-	100 2 10	151.641.800,-	100	89.54

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4. Terlaksananya sosialisasi persandian dan keamanan informasi; 5. Terselenggaranya rakor persandian; 6. Terselenggaranya rapat monitoring dan evaluasi.	kali kali kali	1 1 1		1 1 1			
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi ke pusat; 2. Terlaksananya monev pengelolaan SDM keamanan informasi ke kab/kota; 3. Terselenggaranya bimtek SDM persandian; 4. Terselenggaranya FGD bagi SDM persandian; 5. Terselenggaranya workshop SDM pengelola persandian.	kali kab/kota kali kali kali	2 17 1 1 1	87.158.597,-	2 17 1 1 1	76.131.000,-	100	87.35
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1. Persentase sistem elektronik yang menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibandingkan jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah; 2. Terbayarnya honor tim IT persandian; 3. Terlaksananya bimtek KAMI; 4. Terlaksananya penilaian indeks KAMI ke kab/kota; 5. Terlaksananya penilaian indeks KAMI provinsi dan kab/kota; 6. Terlaksananya penilaian indeks KAMI; 7. Terlaksananya rapat teknis keamanan informasi.	persentase orang kali kab/kota tahun kali kali	100 2 1 17 1 1 1	159.609.300,-	100 2 1 17 1 1 1	147.626.791,-	100	92.49
2.21.02.1.01.04	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase sistem elektronik / aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah;	persentase	100	102.080.995,-	100	94.481.334,-	100	92.56

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Terlaksananya bimtek layanan keamanan informasi bagi OPD; 3. Terlaksananya <i>drill test</i> ; 4. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi layanan layanan keamanan informasi ke pusat; 5. Terlaksananya layanan keamanan informasi provinsi dan kab/kota; 6. Terlaksananya penggunaan layanan keamanan informasi ke kab/kota.	kali kali kali bulan kab/kota	1 1 3 12 17		1 1 3 12 17			
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah	persentase	85	82.820.070,-	100	59.750.150,-	100	72.14
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada PHKS yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi; 2. Terlaksananya bimtek pola hubungan komunikasi sandi; 3. Terlaksananya konsultasi tentang pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi ke BSSN; 4. Terlaksananya pembinaan penerapan pola hubungan komunikasi ke kab/kota; 5. Terlaksananya pembinaan penerapan pola hubungan komunikasi ke OPD; 6. Terlaksananya penerapan pola hubungan komunikasi provinsi dan kab/kota.	persentase kali kali kab/kota kali bulan	100 1 2 4 2 12	82.820.070,-	100 1 2 4 5 12	59.750.150,-	100	72.14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Komunikasi dan Informatika didalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat. Proses layanan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dilakukan melalui pembangunan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi sistem informasi di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Barat.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian;
2. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
3. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Aplikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diubah dengan Pergub No. 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
5. Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
6. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Mengembangkan Nagari Statistik sebagai Pilot Project Nagari yaitu Nagari Sungai Duo di Kabupaten Dharmasraya.

Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang dan Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* di wilayahnya.

Tabel 2.2.1
Tabel T-C.30 Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2022

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;	3,1	3,2	3,3	3,4	2,6	-	3,3	3,4	
2	Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,1	3,2	3,3	3,4	2,6	-	3,3	3,4	
3	Indeks Domain Layanan SPBE;	3,1	3,2	3,3	3,4	2,6	-	3,3	3,4	
4	Indeks Domain manajemen;	3,1	3,2	3,3	3,4	2,6	-	3,3	3,4	
5	Indeks Keamanan Informasi (KAMI);	-	45	47	50	-	-	47	50	
6	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;	-	60	70	80	-	-	70	80	
7	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah;	-	60	70	80	-	-	70	80	
8	Persentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah;	-	10	20	30	-	-	20	30	
9	Nilai akuntabilitas kinerja OPD;	B	B	B	BB	B	-	B	BB	
10	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi;	-	85	86	87	-	-	86	87	
11	Skor /Indeks Keterbukaan Informasi Publik	75	-	-	-	76,55	-	-	-	
12	Persentase Jumlah Perangkat Daerah Yang Menggunakan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50 opd	-	-	-	50 opd	-	-	-	
13	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral yang Handal	90%	-	-	-	100%	-	-	-	

3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tabel 2.3.1
Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik provinsi Sumatera Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Rendahnya pemahaman OPD tentang pemanfaatan data statistik sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas statistik sektoral OPD belum optimal dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan tugas; - Jabatan petugas pengelola statistik sektoral OPD tidak jelas (tugas rangkap/ sambilan); - Dukungan anggaran kegiatan untuk statistik sektoral di OPD tidak dijadikan prioritas (minim/tidak ada).
Belum optimalnya konektivitas telekomunikasi dan komunikasi	Masih adanya <i>blank spot</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya jaringan dan tower telekomunikasi pada titik tertentu pada suatu daerah; - Kondisi geografis yang sulit dan tidak ekonomis.
Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terintegrasi ke dalam SPBE	Peta rencana dan pelaksanaan SPBE Provinsi dan Kab/Kota belum terhubung dengan SIA-SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya beberapa kelemahan dalam dokumen arsitektur SPBE
Masih rendahnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	Belum maksimalnya publikasi kebijakann dan program prioritas pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya produksi konten kebijakan dan program prioritas; - Kurangnya SDM yang kompeten (pranata humas); - Dukungan anggaran yang terbatas.

Tabel 2.3.2
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Rendahnya pemahaman OPD tentang pemanfaatan data statistik sektoral	
Masih adanya <i>blank spot</i>	
Peta rencana dan pelaksanaan SPBE Provinsi dan Kab/Kota belum terhubung dengan SIA-SPBE	
Belum maksimalnya publikasi kebijakann dan program prioritas pemerintah	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L). Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra- K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upayamendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energy, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;

2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah telah yang tiap tahunnya dievaluasi oleh oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain :

1. Domain Kebijakan Internal SPBE;
2. Domain Tata Kelola SPBE;
3. Domain Manajemen SPBE;
4. Domain Layanan SPBE.

Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi. Untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan keterpaduan antar stakeholder dalam mewujudkan sebuah tata kelola yang yang efektif.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tercantum dalam renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi;
3. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2024 adalah :

1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE;
2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE;
3. Indeks Domain Layanan SPBE;
4. Indeks Domain manajemen;
5. Indeks Keamanan Informasi (KAMI);
6. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
7. Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah;
8. Persentase masyarakat yang menerima informasi terkait kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah;
9. Nilai akuntabilitas kinerja OPD;
10. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi

Berikut tabel tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE; 2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE; 3. Indeks Domain Manajemen SPBE; 4. Indeks Domain layanan SPBE.	3,4 3,4 3,4 3,4
			Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Kemanan Infromasi (KAMI)	50
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Perencanaan Pembangunan	80
				Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Statistik untuk Evaluasi Pembangunan	80
2	Meningkatnya Keterbukaan Infoirmasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Penyebarluasan informasi kebijakan, program prioritas dan strategis pemerintah	Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi Terkait Kebijakan, Program Prioritas dan strategis Pemerintah	30
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	87

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2024, Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
A	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
	1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	3.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
	4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	6.	Pelayanan Informasi Publik
	7.	Layanan Hubungan Media
	8.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	9.	Manajemen Komunikasi Krisis
	10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
	12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
B	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
	2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
	2.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		
	3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	4.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
	6.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	7.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	8.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
	9.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
C	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
	3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
	5.	Pengembangan Infrastruktur
	6.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
D	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
	1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	2.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	3.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	5.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
E	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.	Pengadaan Mebel
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memuat Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kebutuhan dana tahun berjalan dan Prakiraan maju sebagaimana dapat dilihat pada tabel T- C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				36.085.652.000				67.157.980.417	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan dasar				21.004.012.019				49.962.980.417	
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				19.325.102.019				47.762.980.417	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi			6.779.510.000				22.525.180.417	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan program strategis pemerintah			6.779.510.000				22.525.180.417	
2.16.02.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen 170.000.000	
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen 425.000.000	
2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen 285.000.000	
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	731.144.793	APBD	-	-	1 Dokumen 890.000.000	
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	4.028.876.637	APBD	-	-	1 Dokumen 12.614.470.417	
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab/Kota, Kecamatan,	1 Dokumen	120.714.000	APBD	-	-	1 Dokumen 1.450.000.000	

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
			Kel/Desa							
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	3 layanan	89.000.000	APBD	-	-	3 layanan	400.000.000
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	80.025.000	APBD	-	-	1 Dokumen	700.000.000
2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Manajemen Komunikasi Krisis	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	45.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	500.000.000
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	300 orang	50.757.000	APBD	-	-	300 orang	800.000.000
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	1.478.992.570	APBD	-	-	1 Dokumen	4.500.000.000
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	80.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	500.000.000
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				12.545.592.019					25.237.800.000
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi				8.455.592.019					20.741.800.000
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	32.546.500	APBD	-	-	1 Dokumen	176.000.000
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	3 unit	8.423.045.519	APBD	-	-	3 unit	20.565.800.000
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				4.090.000.000					4.496.000.000
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan	Kab/Kota, Kecamatan,	1 Dokumen	100.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	150.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
	dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kel/Desa							
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	50.000.000
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan yang Dikelola	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	2 unit	705.000.000	APBD	-	-	2 unit	800.000.000
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	500.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	500.000.000
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	40 PD	500.000.000	APBD	-	-	40 PD	600.000.000
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	4 unit	1.006.551.300	APBD	-	-	4 unit	800.000.000
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	2 layanan	118.448.700	APBD	-	-	2 layanan	443.500.000
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Smart City	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	300.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	320.000.000
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	445.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	467.600.000
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	365.000.000	APBD	-	-	1 Dokumen	365.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				814.455.000					1.100.000.000
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				814.455.000					1.100.000.000
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				814.455.000					1.100.000.000
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	3 Dokumen	212.840.000	APBD	-	-	3 Dokumen	200.000.000
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	100 orang	213.081.900	APBD	-	-	100 orang	200.000.000
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik yang Dihimpun	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 Dokumen	85.590.000	APBD	-	-	1 Dokumen	200.000.000
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	100 orang	208.224.000	APBD	-	-	100 orang	150.000.000
2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 unit	174.000	APBD	-	-	1 unit	200.000.000
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 dokumen	94.545.100	APBD	-	-	1 unit	150.000.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				864.455.000					1.100.000.000
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				864.455.000					1.100.000.000
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				714.455.000					900.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
2.21.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	2 dokumen	200.000.000	APBD	-	-	1 unit	250.000.000
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 laporan	214.455.000	APBD	-	-	1 unit	250.000.000
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 laporan	150.000.000	APBD	-	-	1 unit	200.000.000
2.21.02.1.01.04	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	35 PD	150.000.000	APBD	-	-	35 PD	200.000.000
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi				150.000.000					200.000.000
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	40 PD	150.000.000	APBD	-	-	40 PD	200.000.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				15.081.639.981					17.195.000.000
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				15.081.639.981					17.195.000.000
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah				395.000.000					395.000.000
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	2 dokumen	200.000.000	APBD	-	-	2 dokumen	200.000.000
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 dokumen	45.000.000	APBD	-	-	1 dokumen	45.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 dokumen	45.000.000	APBD	-	-	1 dokumen	45.000.000
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	2 laporan	75.000.000	APBD	-	-	2 laporan	75.000.000
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 laporan	75.000.000	APBD	-	-	1 laporan	75.000.000
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.411.134.250					9.550.000.000
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	85 orang/bulan	8.000.000.000	APBD	-	-	85 orang/bulan	9.000.000.000
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 dokumen	250.000.000	APBD	-	-	1 dokumen	300.000.000
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	12 dokumen	67.976.800	APBD	-	-	12 dokumen	100.000.000
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	17 laporan	98.157.450	APBD	-	-	17 laporan	150.000.000
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				234.480.000					270.000.000
2.16.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	2 dokumen	175.000.000	APBD	-	-	2 dokumen	200.000.000
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 laporan	59.480.000	APBD	-	-	1 laporan	70.000.000
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				450.000.000					500.000.000
2.16.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	20 orang	450.000.000	APBD	-	-	20 orang	500.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.000.306.500				2.320.000.000	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	12 paket	138.816.500	APBD	-	-	12 paket	200.000.000
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	12 paket	200.000.000	APBD	-	-	12 paket	300.000.000
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	12 paket	65.500.000	APBD	-	-	12 paket	100.000.000
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	12 paket	59.990.000	APBD	-	-	12 paket	70.000.000
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	12 paket	38.000.000	APBD	-	-	12 paket	50.000.000
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	12 laporan	1.500.000.000	APBD	-	-	12 laporan	1.600.000.000
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.579.333.720				1.300.000.000	
2.16.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	2 unit	1.279.333.720	APBD	-	-	2 unit	800.000.000
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	7 paket	300.000.000	APBD	-	-	7 paket	500.000.000
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.531.245.111				2.110.000.000	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	800 laporan	5.000.000	APBD	-	-	800 laporan	10.000.000
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	36 laporan	702.104.571	APBD	-	-	36 laporan	900.000.000
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	3 laporan	824.140.540	APBD	-	-	3 laporan	1.200.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024				Kelompok Sasaran	Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target	Pagu Indikatif
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				480.140.400					750.000.000
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapaangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	9 unit	205.745.000	APBD	-	-	9 unit	300.000.000
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	4 unit	50.000.000	APBD	-	-	4 unit	200.000.000
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kab/Kota, Kecamatan, Kel/Desa	1 unit	224.395.400	APBD	-	-	1 unit	250.000.000
JUMLAH					36.085.652.000					67.157.980.417

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2023

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2023

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menjalankan lima (5) program, empat belas (14) kegiatan dan enam puluh (59) sub kegiatan. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 47.547.294.298.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Tahun 2023

Terlampir dari cetakan SIPD.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjadi dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengelolaan dan penataan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka secara terus menerus perlu dilakukan kajian dan penyempurnaan terhadap rencana kerja tahunan ini untuk mengakomodasi berbagai perubahan/dinamika yang terjadi.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik.

Padang, 26 Juli 2022

Kepala Dinas

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and a final upward stroke.

Drs. JASMAN, M.M.

NIP. 19680101 198809 1 001